

MASTER PLAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Pusat Informasi Ketenagakerjaan

Agustus 2001

Jakarta

MASTER PLAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

**DISUSUN OLEH :
TIM PINAKER – BADAN INFORMASI KK**

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
JAKARTA, AGUSTUS 2001**

KATA PENGANTAR

Keberadaan suatu Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang handal sudah menjadi kebutuhan pokok dalam rangka menghasilkan informasi yang akurat, cepat, lengkap dan relevan. Informasi ketenagakerjaan tersebut harus dapat digunakan mendukung pengambilan berbagai keputusan oleh pimpinan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi pemerintah lain yang terkait. Selain itu informasi tersebut juga harus dapat digunakan dengan baik oleh pengguna lainnya termasuk masyarakat luas.

Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang ada sekarang ini di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal ini unit-unit kerja yang menangani bidang ketenagakerjaan, belum dapat berfungsi secara optimal akibat berbagai hambatan yang dihadapi. Sistem tersebut belum terpadu dan terkoordinasi satu sama lain dengan baik. Sifat parsial masih cukup menonjol baik dalam hal pembangunan/pengembangan maupun dalam hal operasi teknis serta manajemennya secara keseluruhan.

Salah satu upaya mendasar untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan menyusun suatu Rencana Induk atau *Master Plan* Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Master Plan SIK). Master Plan seperti ini diharapkan menjadi suatu pedoman dan acuan wajib bagi setiap unit kerja dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan.

Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan ini, adalah merupakan penyempurnaan terhadap Rencana Induk Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Bursa Tenaga Kerja Terpadu yang disusun pada tahun 1994 yang lalu. Penyempurnaan ini dilakukan, mengingat

Rencana Induk yang lama tidak mampu lagi untuk mengakomodasikan berbagai perkembangan dan perubahan yang ada seperti dalam substansi, kelembagaan, dan teknologi informasi, sehingga tidak layak lagi dijadikan sebagai pedoman dan acuan.

Akhirnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk mewujudkan tersusun dan terbitnya Master Plan SIK ini. Harapan saya adalah, kiranya Master Plan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya khususnya oleh setiap unit kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani kegiatan yang berkaitan dengan informasi ketenagakerjaan.

Jakarta, Agustus 2001

Badan Informasi
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kepala,

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
TIM PENYUSUN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Master Plan	3
1.3. Ruang Lingkup	4
BAB II SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN KONDISI SAAT INI	6
2.1. Sistem Informasi Ketenagakerjaan	7
2.2. Peluang dan Tantangan	12
2.3. Peranan Stakeholder	14
BAB III PENGARUH PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS TERHADAP PENYELENGGARA- AN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN	15
3.1. Faktor Lingkungan	16
3.2. Tantangan dan Peluang	18
BAB IV MASTER PLAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN	21
4.1. Visi	21
4.2. Misi	22
4.3. Tujuan dan Sasaran	24
4.4. Strategi Kebijakan	26
4.4.1. Kebijakan/peraturan perundangan	26
4.4.2. Infrastruktur	27
4.4.3. SDM	27
4.4.4. Aplikasi	28
4.4.5. Pengelolaan Sistem Informasi	28
* Kerjasama dengan stake holder	29

	• Sistem dan Jejaring Terpadu	29
	• Pentahapan Pelaksanaan dan Dukungan Biaya	30
	• Pengembangan Teknologi Informasi	31
	• Sosialisasi Sistem Informasi	31
	• Pemeliharaan Sistem Informasi	32
BAB V	PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN	35
5.1.	Program Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi	35
5.2.	Program Pengembangan Infrastruktur	37
5.3.	Program Peningkatan Kompetensi SDM Informasi	39
5.4.	Program Pengembangan Aplikasi	41
5.5.	Program Pengelolaan Sistem Informasi	45
RANGKUMAN		48

TIM KERJA

- Pembina : Kepala Badan Informasi KK
- Penanggung Jawab : Ka. Pusat Informasi Ketenagakerjaan
- Koordinator : Drs. R. Managara Tampubolon
- Penyusun/Penulis : Ir. Sukiyanto
Drs. Pardamean Simanjuntak, M.Si.
Drs. R. Managara Tampubolon
Paryatno
Bambang Wardoyo, SE. MM.
Chairul Rachamadsjah, SE.
- Konsultan : I Wayan Simri Wicaksana, SSI, MEng.
- Editor : Ir. Besar Setyoko, MM.
Drs. Noor Djaelani, MSc.
- Pengolah Data : Elvie Yulifah, S.Pd.
Elly Harti
Sri Ning Sulastri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan dunia yang begitu cepat serta arus globalisasi semakin meluas menuntut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan informasi yang handal yang mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Depnakertrans dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan memerlukan informasi ketenagakerjaan yang handal, untuk mendukung kegiatan operasional maupun untuk proses pengambil keputusan dengan tepat dan cepat, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Dengan makin kompleksnya masalah ketenagakerjaan yang berimplikasi terhadap masalah sosial dan stabilitas keamanan, maka menjadi keharusan bagi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan tersebut secara cepat dan tuntas, melalui penyusunan berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Dalam rangka itu diperlukan dukungan data dan informasi ketenagakerjaan yang berkualitas (definisi lihat lampiran).

Penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang berkualitas sangatlah sulit dilaksanakan dan diwujudkan. Beberapa kendala utama yang terasa pada saat penyusunan Master Plan ini adalah keterbatasan biaya, perubahan struktur organisasi pemerintahan termasuk dalam penerapan UU no 22 tahun 1999

tentang Otonomi Daerah yang berakibat penyediaan data dari daerah ke pusat. Apabila keadaan ini tidak dipecahkan maka penyusunan berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan serta penyediaan informasi untuk pelayanan bagi pengguna informasi ketenagakerjaan di masyarakat akan mengalami hambatan.

Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka perlu dibangun dan dikembangkan sistem informasi ketenagakerjaan, yang mengacu kepada 5 (lima) pilar sistem informasi ketenagakerjaan yaitu :

- kebijakan pembangunan dan pengembangan,
- infrastruktur,
- sumber daya manusia,
- aplikasi, dan
- pengelolaan.

Melalui sistem informasi ini, dapat diakses berbagai informasi ketenagakerjaan dari daerah maupun antar unit di pusat secara *on line*, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.

Melihat betapa luas dan pentingnya informasi di bidang ketenagakerjaan yang harus dikelola dalam suatu Sistem Informasi, maka sudah sepatutnya kegiatan ini dilengkapi dengan suatu rencana yang sifat dan cakupannya global. Rencana seperti sangat diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam pembangunan dan pengoperasian sistem.

Sebelum Departemen Tenaga Kerja bergabung dengan Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan, sudah ada Rencana Induk/Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Namun demikian akibat terjadinya berbagai perkembangan antara lain dalam substansi, kelembagaan dan teknologi informasi maka Master Plan tersebut perlu ditinjau dan diperbaharui. Hal ini sangat

penting agar muatannya senantiasa dapat dijadikan pedoman aktual dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan sistem.

Mengingat kegiatan penyempurnaan Master Plan ini dirancang dan diusulkan sebelum penggabungan Departemen Tenaga Kerja dengan Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka substansi yang dimuat hanya meliputi aspek informasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, nama kegiatan tersebut adalah :

“Penyempurnaan Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan”.

1.2. Tujuan Penyusunan Master Plan

Penyusunan Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan ini, dimaksudkan untuk menyempurnakan Rencana Induk Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang disusun tahun 1994, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi kondisi sistem informasi ketenagakerjaan dan analisis berbagai kekuatan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan saat ini dan masa mendatang.
2. Penetapan strategi mengenai kebijakan, infrastruktur, sumberdaya manusia, aplikasi dan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Penetapan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan di lingkungan Depnakertrans melalui penggalangan kerjasama dengan stakeholder, integrasi sistem, pentahapan

- pelaksanaan, pengembangan teknologi informasi, sosialisasi dan pemeliharaan sistem informasi ketenagakerjaan.
4. Sebagai acuan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan di unit kerja yang menangani bidang ketenagakerjaan.
 5. Mempersiapkan program dan rencana pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan baik menyangkut kebijakan sistem informasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pengembangan aplikasi dan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.

1.3. Ruang Lingkup Penyusunan Master Plan

Berdasarkan tujuan penyusunan master plan yang telah diuraikan sebelumnya maka ruang lingkup Master Plan ini meliputi: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan (jangka pendek, menengah, dan panjang).

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Master Plan mencakup 2 (dua) aspek yaitu :

“

1. Mempelajari kondisi yang ada saat ini yang telah dilakukan, dikembangkan untuk Sistem Informasi Ketenagakerjaan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja (dan Transmigrasi).
2. Memperhatikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyusunan, implemmentasi ataupun penyesuaian dalam Master Plan.
3. Mengembangkn Visi, Misi, dan Program untuk Master Plan sampai dengan tahun 2010.

BAB II

SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN KONDISI SAAT INI

Sistem informasi ketenagakerjaan yang telah dikembangkan sampai saat ini difokuskan kepada dua sasaran. Pertama, adalah manajemen sistem informasi yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang memadai bagi pimpinan Departemen sebagai bahan dalam perumusan dan pengambilan keputusan/kebijakan (*decision support*) di bidang ketenagakerjaan. Kedua, adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat (*public service*).

Manajemen sistem informasi untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan serta pelayanan informasi kepada masyarakat dikembangkan melalui berbagai kegiatan, meliputi : pengembangan aplikasi, manajemen data, modeling, analisis statistik, perencanaan, penyusunan, data base dan konsolidasi data. Produk informasi untuk pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan dibangun dalam suatu sistem tertutup yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat, melainkan semata-mata adalah untuk kepentingan pengambil kebijakan. Sedangkan produk informasi yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat telah dikembangkan pembangunan situs yang dapat diakses langsung melalui internet oleh masyarakat dengan alamat situs: [http:// www. depnaker. go.id](http://www.depnaker.go.id)

2.1 Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Ketenagakerjaan selama ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah merupakan ujung tombak dari sebuah sistem informasi. Pada saat ini pengumpulan dilakukan pada titik terujung adalah pada level Kandep (setelah Otonomi Daerah nama berubah), dengan beberapa kondisi sebagai berikut :

- Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari internal ex unit Kantor Depnaker. Pengumpulan data primer dilakukan di tingkat ex Kantor Departemen Tenaga Kerja (saat ini Dinas Tenaga Kerja), Unit Pelaksana Teknis (Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Daerah, Balai AKAN, P4D) dalam bentuk *administrative record*. Data sekunder dikumpulkan melalui ex Kanwil Depnaker atau Instansi yang menangani masalah ketenagakerjaan di Propinsi, Kabupaten/Kota berupa laporan rekapitulasi.
- Data sekunder juga diperoleh dari instansi pemerintah lainnya, seperti: Badan Pusat Statistik, Depdiknas, dan lain-lain.
- Ex Kandepnaker atau Instansi yang menangani ketenagakerjaan di tingkat kota/kabupaten sebagai ujung tombak pengumpulan data primer kurang mendapatkan perhatian yang memadai dan hal ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap kualitas data.

2.1.2. Pengolahan data

Data yang terkumpul belum memiliki makna yang berarti bagi publik dan pengambil keputusan. Diperlukan tahapan pengolahan data agar dapat menjadi informasi. Beberapa proses pengolahan data telah dilakukan selama ini, dengan hasil sebagai berikut :

- Pengolahan data di sebagian besar ex Kandepnaker masih dilakukan secara manual.
- Pengolahan data di ex Kanwil Depnaker dan di Kantor Pusat sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Pada umumnya menggunakan perangkat lunak *spreadsheet*,

namun penggunaan program aplikasi maupun data base masih terbatas dan belum optimal. Di samping itu, manajemen data (*storage, maintenance, data retrieval, data security*) belum tertata secara rapih.

2.1.3. Arus data/Informasi

Informasi yang diperoleh dari pengolahan data tidaklah menjadi berharga jika penyebaran informasi masih belum berjalan mencapai ke targetnya. Sistem arus data/informasi saat ini masih berbentuk sebagai berikut :

- Arus data/informasi internal Depnaker mengalir dari bawah ke atas, dari Kandepnaker/UPT menuju Kanwil Depnaker Dinas Tenaga Kerja dan selanjutnya ke Pusat (Ditjen/Direktorat terkait).
- Arus data/informasi secara horizontal terjadi di tingkat unit kerja. Di tingkat Kandepnaker data/informasi dari masing-masing seksi dikumpulkan pada Subbag Tata Usaha untuk kompilasi menjadi bentuk laporan. Pada tingkat Kanwil Depnaker Dinas Tenaga Kerja data/informasi dari masing-masing bidang dikumpulkan pada Bidang Binagram untuk diolah menjadi Laporan Kanwil Depnaker. Di tingkat Pusat seluruh data/informasi dari masing-masing Direktorat dihimpun di Sekretariat Ditjen untuk diolah dan dijadikan laporan.
- Periode penyampaian data/laporan dilakukan secara rutin, yaitu setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Meskipun demikian bilamana terdapat hal-hal yang penting dapat diminta data/informasi dari unit yang bersangkutan secara insidental sesuai dengan kebutuhan.
- Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kandepnaker dan Kanwil Depnaker Dinas Tenaga Kerja menjadi lembaga otonom, masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi membentuk organisasinya masing-masing

- Pertukaran data/informasi dengan pihak lain relatif masih sedikit, sebagian besar dilakukan antar instansi dan lintas sektoral di lingkungan pemerintah, sedangkan ke pihak publik dan internasional masih sangat kurang. Data/informasi disajikan dalam bentuk tercetak.

2.1.4. Penyajian Informasi

Penyajian informasi menjadikan hal yang penting untuk memudahkan dalam pengaksesan dan pemahaman informasi. Pada saat ini berbagai usaha telah dilakukan sebagai berikut :

- Informasi pada umumnya disajikan dalam bentuk buku laporan dan publikasi data statistik.
- Penyajian data/informasi sebagian besar untuk keperluan pemerintah, sedangkan untuk pelayanan masyarakat relatif masih kurang.
- Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, ex Depnaker Pusat telah memiliki Homepage dengan alamat situs <http://www.depnaker.go.id> dan saat ini telah digabungkan dengan web Depnakertrans <http://www.nakertrans.go.id> yang dapat diakses langsung oleh masyarakat umum. Masalah kualitas informasi masih merupakan kelemahan utama.
- Penyajian informasi melalui situs web cukup mendapat tanggapan dari masyarakat dengan banyaknya komentar, kritik dan saran, terutama mengenai kelengkapan dan kemitakhiran data/informasi yang disajikan.

2.1.5. Sumber daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada umumnya merupakan faktor terakhir yang dipertimbangkan pada pengembangan sistem informasi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan potret yang ada sebagai berikut :

- Keterbatasan **SDM** (Sumberdaya Manusia) dalam menangani **SIM** (*Sistem Informasi Manajemen*) Ketenagakerjaan merupakan kendala utama. Keberadaan SDM secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas pada tingkat *programmer, system analyst, data base administrator, data communication specialist*, sedangkan untuk tingkat operator dipandang cukup memadai.
- Para pegawai umumnya kurang minat dalam menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer, karena memerlukan keterampilan khusus dan relatif sulit dalam mendapatkan angka kredit.
- Penempatan pegawai di tingkat manajerial dan operasional kurang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Pendidikan dan pelatihan untuk *tingkat programmer, system analyst*, dan sejenisnya dirasakan masih sangat kurang, sedangkan pendidikan dan pelatihan untuk operator dinilai telah memadai.

2.1.6. Organisasi

Salah satu keberhasilan dari penerapan sistem informasi adalah dukungan organisasi yang baik. Saat ini telah ada bagian yang menangani masalah sistem informasi, dengan berbagai kondisi sebagai berikut :

- Dengan telah dibentuknya Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (BIKK), maka fungsi dan tugas pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab BIKK.

- Di tingkat Direktorat Jenderal, pengelolaan data berada di Bagian **PPEL** (Penyusunan Program, Evaluasi, dan Laporan) pada Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Di lingkungan BIKK mekanisme kerja di tingkat eselon II kurang ada kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab sehingga banyak kegiatan teknis yang tumpang tindih atau sama sekali tidak tertangani.
- Di jajaran Depnakertrans penyelenggaraan informasi ketenagakerjaan kurang adanya koordinasi antar unit eselon I.

2.1.7. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Umumnya pada pengembangan sistem informasi, faktor perangkat keras dan perangkat lunak adalah merupakan prioritas tertinggi. Ini dapat dilihat pada sarana yang dimiliki pada perangkat keras dan lunak dibandingkan penunang lainnya, sebagai berikut :

- Telah dibangun jaringan LAN di gedung Depnakertrans jalan Gatot Subroto yang menghubungkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) PC- workstation dengan 2 (dua) server induk berada di Pusat Informasi Ketenagakerjaan. Di samping itu juga terdapat LAN di beberapa Ditjen dan Biro.
- Masing-masing unit eselon I telah mengembangkan sistem aplikasi untuk keperluan intern.

2.2. Kerjasama dengan Stakeholder

Analisis tentang pentingnya peranan stakeholder dari sisi internal dan eksternal merupakan hal yang penting dalam suksesnya sebuah sistem sistem informasi. Fungsi dasar adalah sebagai alur untuk data masuk ataupun sebagai alur keluar untuk pendistribusian data dan informasi. Sayangnya selama ini faktor stakeholder belum

dibahas secara mendalam, apalagi sampai ketahap penjalinan kerjasama secara lebih intensif.

Hubungan dengan stakeholder yang telah terjalin saat ini adalah berkaitan dengan kebutuhan data makro misalnya kerjasama dengan BPS, BKPM, SPSI, APINDO, APJATI, BI, Depdiknas, dan lain-lain. Sedangkan yang berkaitan dengan kebutuhan data mikro dijalin hubungan dengan unit teknis di lingkungan Depnakertrans.

BAB III

PENGARUH PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS TERHADAP PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Dalam dasa warsa terakhir ini, kesadaran penggunaan teknologi informasi di masyarakat semakin meningkat, terlihat dari meningkatnya kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi di hampir semua bidang kehidupan.

Kesadaran akan pentingnya sistem informasi terlihat pula dari penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikenal dengan Sistem Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja (SIPPTEK). Sistem ini berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional pasar kerja khususnya dalam upaya menyediakan informasi penyediaan dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perencanaan penyaluran tenaga kerja melalui mekanisma Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), sistem informasi yang dihasilkan dapat juga dijadikan masukan bagi perencanaan pelatihan dan sebagai bahan pembimbingan atau penyuluhan jabatan.

Pada saat Indonesia sedang membangun sistem informasi ketenagakerjaan kita dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis, yaitu perubahan dunia yang cepat, persaingan antara negara semakin ketat, serta meluasnya arus global yang menuntut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan informasi secara lebih akurat, tepat, cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Perubahan lingkungan strategis tersebut adalah berupa tantangan dan sekaligus peluang bagi terciptanya sistem informasi ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Faktor Lingkungan

Perubahan faktor lingkungan dalam penyusunan master plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah sangat beragam. Dari yang bersifat teknologi, kebijakan, organisasi, model bisnis sampai dengan budaya. Untuk melihat semua faktor adalah sangat sulit. Berdasarkan dari berbagai acuan, maka faktor yang dilihat adalah faktor kebijakan dan teknologi sebagai prioritas acuan.

Faktor Kebijakan akan dilihat berdasarkan cakupan dari kebijakan yang bersangkutan, faktor tersebut adalah :

3.1.1. Kebijakan Internal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kebijakan internal adalah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan master plan teknologi informasi. Beberapa faktor yang langsung terkait adalah :

- Kepmenaker No. 28/1993 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja.
- Kepmenakertrans No. 23/2001, Pasal 770 tentang tugas Badan Informasi dan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kepmenakertrans No. 23/2001, Pasal 771 tentang fungsi Badan Informasi dan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.1.2. Kebijakan Nasional di Bidang Teknologi Informasi

Sistem Informasi Ketenagakerjaan saat ini masih digunakan sebagian besar untuk keperluan internal di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan tuntutan eGovernment maka pertukaran data dan informasi lintas instansi menjadi semakin penting. Dalam rangka menuju kesana, Master Plan ini disusun dengan memperhatikan beberapa kerangka acuan yang ada di tingkat Nasional. Adapun kebijakan yang dapat dikaitkan adalah sebagai berikut :

- Nusantara 21 tentang Master Plan untuk infrastruktur penunjang teknologi informasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *ring archipelago*.
- Telematika tentang Master Plan untuk pengembangan teknologi informasi nasional.
- UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, yang merupakan infrastruktur penting dalam pengembangan sarana sistem informasi.
- Pengembangan Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN) yang dikembangkan oleh Bappenas.
- Kepres No. 50/2000 tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
- Kepres No. 22/1999 tentang Pengembangan Otonomi Daerah.
- Inpres No. 2/2001 tentang penggunaan komputer dengan aplikasi komputer berbahasa Indonesia.
- Inpres No. 6/2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika

3.1.3. Kebijakan Regional dan Internasional Bidang Teknologi Informasi

Perdagangan regional semakin menuntut untuk dilakukan pertukaran data secara elektronik. Beberapa dokumen tentang kebijakan telah mulai dikeluarkan seperti :

- The Fourth ASEAN Informal Summit tentang pengembangan dan pemanfaatan e-ASEAN oleh negara peserta, dicetuskan di Singapura November 2000.
- AFTA 2003 tentang perdagangan bebas di lingkungan ASEAN
- Dokumen-dokumen WTO yang berkaitan dengan teknologi informasi

3.1.4. Teknologi

Perkembangan Teknologi Informasi sangat cepat, sehingga dalam penerapan Master Plan perlu memperhatikan secara bijak. Beberapa data / informasi yang perlu diperhatikan dalam perkembangan teknologi adalah :

- Standar protokol komunikasi pada Teknologi Informasi.
- Standar Operabilitas dan Kompatibilitas.
- Kecepatan perkembangan teknologi membuat usia hidup (*life time*) suatu produk teknologi informasi rata-rata tiga tahun.
- Peningkatan kemampuan komputasi terhadap harga yang relatif semakin ekonomis.

3.2. Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan adalah bagaimana menyediakan informasi yang handal. Informasi yang handal dimaksud adalah informasi ketenagakerjaan yang jelas dan baku pengertiannya,

mudah, cepat, akurat, aman dan berkualitas dalam perolehan, pengolahan, pengelolaan dan ketersediaannya. Oleh karena itu tantangan pertamanya adalah mewujudkan ketersediaan informasi ketenagakerjaan yang handal dapat dipergunakan. Dengan mengacu kepada beberapa faktor di atas maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang yang terjadi dalam pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagai berikut :

3.2.1. Tantangan

- Organisasi dan Standard Operating Prosedur (SOP) bidang Teknologi Informasi belum tersusun dan terimplementasi secara Optimal.
- Pembangunan Sistem Informasi masih parsial dan belum terintegrasi secara baik.
- Pembangunan Sistem Informasi belum mengacu kepada sebuah master plan sistem informasi yang disepakati bersama.
- Mekanisme pengumpulan data masih lemah.
- Penerapan Otonomi Daerah perlu diperhatikan untuk mengurangi masalah pada arus data untuk kepentingan nasional.
- Budaya pemanfaatan Teknologi Informasi masih rendah.
- Kuantitas dan Kualitas SDM di bidang TI belum memadai
- Bagian pelaksana Teknologi Informasi dianggap 'kering'.
- Dukungan anggaran untuk operasional, pemeliharaan dan pengembangan tidak memadai.
- Globalisasi dan Bisnis yang semakin menghilangkan batasan negara akan mempengaruhi kebijakan Depnakertrans secara umum ataupun dalam bidang Teknologi Informasi, hal ini

mengacu kepada AFTA 2003 dan dokumen-dokumen WTO tentang teknologi informasi.

- Perkembangan teknologi informasi membuat beberapa perangkat keras dan lunak menjadi mudah tertinggal.

3.2.2. Peluang

- *Standard Operating Procedure* (SOP) lebih mungkin diselaraskan dengan perubahan Departemen Tenaga Kerja menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adanya susunan kabinet baru ataupun transisi ke model Otonomi Daerah. Mengacu kepada Kepmenakertrans No. 23/2001, pengembangan SOP dapat dilakukan dan diterapkan.
- Sistem informasi paling tidak telah dirintis, sehingga perangkat keras, aplikasi dasar dan internet telah dimiliki. Sehingga pembangunan tidak dimulai dari nol, tetapi adalah melakukan prioritas, pengoptimalisasian yang ada, dan visi-misi yang jelas.
- Pengambilan keputusan secara nasional dan daerah dapat dilakukan lebih baik dengan tersedianya data dan informasi yang berkualitas. Ini didukung dengan terbentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (Kepres No.50/2000), dikembangkannya Kerangka Teknologi Informasi Nasional.
- Melakukan koordinasi antar bagian pada intern Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pihak instansi terkait, untuk mengetahui, menyetujui, mendukung, mengimplementasikan, mengevaluasi serta menyempurnakan master plan sistem informasi secara berkesinambungan.
- Ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi terjadi peningkatan, walaupun belum memadai. Kecenderungan seperti ini bisa mendorong pelayanan informasi ketenagakerjaan yang lebih terjangkau, cepat, murah dan berkualitas. Sarana

komunikasi sudah mulai diterapkan melihat kepada Nusantara 21, telematika, UU 36/1999.

- Dengan semangat Otonomi Daerah (Kepres No.22/1999), kualitas dan kuantitas pengumpulan data bukan lagi hanya tanggung jawab pusat, tetapi adalah terdistribusi kepada daerah, tugas pusat adalah melakukan rekapitulasi data dari daerah. Sehingga jika terjadi pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data yang tidak memadai, maka ini merupakan tanggung jawab daerah, bukan di Pusat lagi.
- Mengembangkan pemberdayaan Teknologi Informasi di lingkungan Depnakertrans sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sarannya, ini dapat mengacu kepada Inpres No. 6/2001
- Telah tersedia sarana SDM dasar dan pola pengembangan serta pelatihan SDM. Pola ini bisa diterapkan untuk pengembangan SDM bidang teknologi informasi, termasuk hal terkait dalam jenjang struktural dan fungsional serta faktor penunjang lainnya.
- Merubah paradima dari Cost Center menjadi Profit Center dengan semangat wirausaha profesional tanpa mengabaikan faktor legalitas dan pelayanan masyarakat.
- Merubah paradigma dari Cost Center menjadi Profit Center dengan semangat wirausaha profesional tanpa mengabaikan faktor legal dan pelayanan masyarakat.
- Melakukan kebijakan yang selaras agar potensi yang dimiliki oleh Indonesia bisa dijadikan nilai jual yang baik, seperti jumlah penduduk, pelatihan, penanaman modal dan sebagainya. Ini didukung dengan e-ASEAN yang memudahkan pelaksanaan antar negara.
- Memilih perangkat keras dan lunak yang tepat guna serta tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan waktu hidup yang dapat mudah

untuk ditingkatkan. Dengan melihat kebijakan dan kemajuan Teknologi dapat dilakukan strategi yang tepat.

BAB IV

MASTER PLAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Sistem Informasi Ketenagakerjaan di masa depan akan dihadapkan dengan perubahan dan perkembangan yang semakin pesat dan bersifat global. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan diterapkannya pola pemerintahan baru di Indonesia yaitu otonomi daerah akan menimbulkan tantangan tersendiri terhadap Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan itu, organisasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan tersebut dituntut untuk dapat segera melakukan konsolidasi sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal.

Langkah awal yang sangat penting bagi setiap organisasi dalam rangka mengadaptasi lingkungannya tersebut adalah dengan merumuskan visi, misi dan strategi yang tepat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau landasan gerak organisasi tersebut, seperti yang akan disajikan berikut ini :

4.1. Visi

Visi merupakan kristalisasi obsesi dan cita-cita ideal yang akan dicapai di masa depan. Kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang semakin tinggi dalam berbagai aspek mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap informasi ketenagakerjaan yang memiliki kualitas tinggi. Informasi ketenagakerjaan sedemikian itu akan diperlukan oleh berbagai pihak seperti : angkatan kerja, pengusaha, penyelenggara pendidikan/pelatihan, instansi pemerintah penanggung jawab

fungsional pembinaan ketenagakerjaan, perguruan tinggi, peneliti dan masyarakat luas yang berada di dalam maupun di luar negeri. Sehubungan dengan itu, maka visi Sistem Informasi Ketenagakerjaan tersebut adalah :

Menjadi Penyedia Informasi Ketenagakerjaan Yang Terbaik Bagi Pengguna.

Visi tersebut diatas harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran organisasi sehingga semua anggota organisasi menjadi paham dan memiliki komitmen yang kuat secara bersama-sama untuk mewujudkan visi tersebut.

4.2. Misi

Misi merupakan tugas pokok Sistem Informasi Ketenagakerjaan sehari-hari. Pelaksanaan misi adalah suatu kewajiban dalam rangka pencapaian visi. Dengan kata lain, misi adalah tugas utama yang harus senantiasa dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Dalam kaitannya dengan tugas ketenagakerjaan, Sistem ini harus mampu mengemban tugas-tugas pengelolaan input, pengelolaan proses dan pengelolaan output dengan derajat yang sama baiknya.

Sehubungan dengan itu, maka yang menjadi **misi Sistem Informasi Ketenagakerjaan** adalah :

Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh sistem yang tersebar/ terdistribusi ke dalam sistem informasi ketenagakerjaan yang terpadu dan aman.

Dengan uraian sebagai berikut :

- Mengumpulkan data ketenagakerjaan dari berbagai aspek dan sumber data melalui prosedur yang mudah, cermat,

murah dan terpercaya, serta mengorganisasikannya sedemikian rupa sehingga mudah dikelola dan diakses oleh mereka yang membutuhkan.

- Mengolah data terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan sehingga menjadi informasi dan pengetahuan (*knowlegde*) yang dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan.
- Meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi yang berkepentingan.
- Melakukan upaya sosialisasi gagasan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu secara intensif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan kultur masyarakat informasi.
- Mendistribusikan data, informasi dan pengetahuan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan kepada pemerintah sebagai bahan analisis dari kajian untuk melahirkan kebijakan yang berkualitas.

4.3. Tujuan dan Sasaran

4.3.1. Tujuan

Tujuan Penyempurnaan Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah :

- Sebagai pedoman dan acuan yang lebih sesuai dalam membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang berkualitas dengan model terintegrasi, tersebar, terkoordinas dan aman.

- Sebagai langkah yang efisien dan efektif untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan di setiap unit kerja yang menangani tugas ketenagakerjaan di pusat.
- Sebagai rambu-rambu tentang arah dan cara pembangunan/pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.

4.3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan di masa yang akan datang adalah :

- **Jangka Pendek 2002-2004 :**
 - Terbentuknya landasan hukum dan peraturan yang jelas dan rasional guna mendukung lancarnya pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
 - Tersedianya infrastruktur dasar Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
 - Tersedianya SDMI ketenagakerjaan yang cakap dan profesional.
 - Tersedianyan standard atau bakuan, baik dalam pelaksanaan, pengembangan sistem informasi
 - Tersedianya aplikasi-aplikasi guna mendukung substansi-substansi ketenagakerjaan yang penting dan mendesak.
- **Jangka Menengah 2005-2007 :**
 - Tersusunnya organisasi dan manajemen Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dipahami dan dilaksanakan semua pihak terkait di jajaran Depnakertrans guna mendukung berjalan lancarnya sistem informasi ketenagakerjaan di Depnakertrans.

- Tersusun dan berjalan lancarnya mekanisme dan sistem alir data ketenagakerjaan dari sumber data (internal maupun eksternal) guna mendukung tersedianya data yang lengkap, akurat, cepat dan mutakhir.
 - Meningkatnya jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi ketenagakerjaan.
- **Jangka Panjang 2008-2010 :**
 - Tercapainya optimasi cakupan data ketenagakerjaan minimal mencapai 70 % dari jumlah daerah di Indonesia dengan keterlambatan maksimum 3 bulan.

4.4. Strategi Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah pokok/kunci yang akan ditempuh namun membawa dampak besar dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian visi untuk jangka panjang. Berbeda dengan visi dan misi yang bersifat relatif permanen, maka pilihan strategi bersifat lebih fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan waktu (jangka pendek, menengah dan panjang). Strategi kebijakan dalam pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan ke depan mengacu kepada lima pilar utama yakni :

- Kebijakan peraturan/ perundangan
- Infrastruktur
- Sumberdaya Manusia
- Aplikasi
- Pengelolaan sistem informasi.

4.4.1. Kebijakan Peraturan/Perundangan

Agar Sistem Informasi Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya dukungan dan pemahaman dari *Top Management*, serta adanya aturan internal yang jelas dan nyata (*applicable*) yang dipahami dan ditaati serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaku yang terlibat dalam sistem informasi ketenagakerjaan di jajaran Depnakertrans. Perangkat aturan dimaksud dimulai dari Surat Keputusan Menteri sebagai landasan hukum hingga peraturan-peraturan yang lebih rendah seperti standar operasi dan prosedur. Sedangkan ke luar, dilakukan penggalangan kerjasama dengan daerah dan para stakeholder melalui semacam kesepakatan kerja sama.

4.4.2. Infrastruktur

Strategi di bidang infrastruktur dilakukan melalui pendekatan pembangunan infrastruktur dasar dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki. Pembangunan infrastruktur diusahakan dilakukan dengan metode kemitraan saling menguntungkan dengan stakeholder atau institusi yang kompeten dengan tetap berada pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Langkah strategi tersebut merupakan strategi jangka pendek.

4.4.3. Sumberdaya Manusia

Strategi pembinaan dan pengembangan SDM ditujukan pada dua kelompok yang berkaitan dengan sistem informasi. Pertama, bagi para manajemen dalam jangka pendek adalah menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya sistem informasi hingga akhirnya menjadikan kepedulian

(*awareness*) bahwa sistem informasi merupakan suatu kebutuhan. Kedua, bagi pengelola dan teknisi sistem informasi, strategi dalam jangka pendek dan menengah adalah melakukan peningkatan dan pembinaan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat internal dan inhouse training bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang manajemen dan teknologi informatika. Untuk jangka panjang perlu re-training seiring dengan perkembangan teknologi informatika, pendidikan formal di bidang teknologi informatika, serta pola karir yang jelas dan terarah.

4.4.4. Aplikasi

Di bidang aplikasi, strategi jangka pendek ditekankan pada pembangunan dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang dari segi kebutuhan informasi maupun pemecahan masalah merupakan hal yang kritis dan mendesak dan memiliki nilai solusi yang ekonomis. Dalam jangka pendek pembangunan aplikasi masih memerlukan bantuan dan kerjasama dari keahlian di luar Depnakertrans sambil dilakukan alih pengetahuan dan ketrampilan. Selanjutnya dalam jangka menengah, lebih ditekankan pada pengembangan mandiri.

4.4.5. Pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Agar sistem informasi yang dibangun berjalan dengan baik maka perlu dikelola dengan baik dan benar, serta terus dikembangkan seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi informatika serta perkembangan kebutuhan pengguna dalam hal ini khususnya para stakeholder. Strategi kebijakan

pengelolaan sistem informasi dimaksud terutama mencakup aspek-aspek :

- Kerja sama dengan stakeholder
- Sistem dan jejaring terpadu
- Pentahapan pelaksanaan dan dukungan biaya
- Pengembangan teknologi informasi
- Sosialisasi sistem informasi
- Pemeliharaan sistem informasi.

- **Kerja sama dengan stakeholder**

Stakeholder Sistem Informasi Ketenagakerjaan perlu diketahui dengan jelas. Hal ini penting guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada para pengguna informasi secara keseluruhan. Stakeholder tersebut bukan hanya kelompok pengguna informasi, melainkan segenap pihak yang terkait dengan sistem, baik langsung maupun tidak langsung. Tahapan mulai dari input – proses – output pada hakekatnya masing-masing mempunyai stakeholder. Namun demikian, stakeholder tersebut hendaknya diklasifikasikan menurut tingkat urgensi keterlibatannya. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan identifikasikan stakeholder dalam hal ini yang akan menjadi sumber data dan pemanfaat informasi ketenagakerjaan

- **Sistem dan jejaring terpadu**

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan dan operasionalisasi sistem yang terpadu dan berkesinambungan namun terdesentralisasi, baik dalam pengertian horizontal (antar unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pusat) maupun secara vertikal (antar daerah dan antar daerah dengan pusat). Keterpaduan tersebut diharapkan akan meliputi interkoneksi elektronik antar sub sistem secara keseluruhan dimana pusat dan daerah

mempunyai kewenangan untuk menyebarluaskan output informasi yang mempunyai cakupan sesuai wilayah tanggung jawabnya, dimana pusat memiliki tugas untuk rangkuman nasional sekaligus menjadi koordinator. Hal ini perlu untuk menjamin kualitas dan konsistensi sistem secara keseluruhan sekaligus untuk memelihara integrasi bangsa. Sedangkan desentralisasi dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri tanpa bertentangan dengan kepentingan nasional.

- **Tahapan pelaksanaan dan dukungan biaya**

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan memerlukan proses yang memerlukan waktu, dinamis dan berkesinambungan. Namun demikian, dalam konteks teknis pelaksanaan, perlu ditetapkan tahapan-tahapan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai seperti telah diuraikan pada bagian awal bab ini. Dalam hal ini pelaksanaan dibagi ke dalam tiga tahap yakni, tahap jangka pendek tahun 2002-2004, jangka menengah tahun 2005-2007 dan jangka panjang tahun 2008-2010.

Untuk dapat tercapainya sasaran yang diinginkan melalui pelaksanaan program yang disusun, maka perlu adanya dukungan ketersediaan biaya. Sumber pembiayaan diharapkan dari berbagai sumber yaitu : APBN, bantuan pinjaman lunak, hibah, pola kemitraan dengan stakeholder, serta dalam jangka panjang diharapkan menjadi swa dana (*profit centre*).

- **Pengembangan teknologi informasi**

Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu tulang punggung, dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan dukungan biaya.

.Pengembangan teknologi meliputi teknologi perangkat keras termasuk komunikasi berbasis jaringan komputer, serta teknologi perangkat lunak.

- **Sosialisasi sistem informasi**

Sasaran Sistem Informasi Ketenagakerjaan dinilai berhasil apabila sistem informasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder dan mereka merasa puas terhadapnya. Selain untuk memperkenalkan diri, sosialisasi dimaksudkan pula untuk mendapatkan umpan balik untuk peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. Untuk dapat dikenal dan dimanfaatkan, maka perlu disosialisasikan melalui metode dan berbagai teknologi media yang mungkin. Sosialisasi internal Depnakertrans dilakukan melalui keputusan atau instruksi Menteri, forum rapat pimpinan dan sejenis, program-program diklat kedinasan maupun non-kedinasan, serta bimbingan teknis. Sosialisasi keluar (eksternal) dilakukan melalui jaringan komputer seperti website NakertransNet dan linkage ke website lain baik pemerintah maupun non-pemerintah akan merupakan proposi semakin besar untuk menekankan kepada efisiensi, ekonomis dan kualitas data. Walaupun media masa elektronik dan cetak termasuk leaflet, buku poster dan sebagainya tetap dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

- **Pemeliharaan sistem informasi**

Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara keseluruhan yang meliputi semua komponen atau aspek yang terlibat seperti sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data dan lain sebagainya. Strategi ini sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal dan berkesinambungan. Faktor pembinaan kemampuan SDM merupakan prioritas,

sehingga dalam jangka panjang secara mandiri mampu melakukan pemeliharaan dan menjawab problem yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan data.dengan cepat dan baik.

Dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan perlu diterapkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengkoordinasian, pengarahan/pembinaan dan pengendalian.

- **Perencanaan** : menyangkut penetapan kesepakatan tentang tujuan dan kebijakan, prosedur dan program-program.
- **Pengorganisasian** : menyangkut pengelompokan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan menetapkan bentuk serta hubungan keorganisasian untuk menjalankannya, serta penetapan mekanisme dan standar operasi dan prosedur.
- **Penyusunan Staf** : menyangkut pemilihan, penempatan dan pelatihan staf untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem informasi ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan uraian pekerjaan spesifikasi jabatan yang berkaitan dengan teknis komputer dan analisis data ketenagakerjaan, serta kualifikasi untuk pemangku pekerjaan/jabatan struktural, non struktural dan fungsional, serta karir ke masa depanl.
- **Pengkoordinasian** : berkaitan dengan kegiatan penjadwalan kegiatan-kegiatan dalam urutan-urutan pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan perangkat keras, lunak dan aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan yang akan dibangun dan dikembangkan, termasuk pengkomunikasian

perubahan kebutuhan yang didukung oleh teknologi informasi yang berkembang.

- **Pengarahan** : menyangkut kepemimpinan, pemberian pedoman, pengarahan dan pemotivasian staf dalam organisasi.
- **Pengendalian** : menyangkut pengukuran prestasi dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan dan perbaikan kegiatan atau perbaikan kebijakan, prosedur dan program.

BAB V

PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN

5.1. Program Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi

Dalam program penyusunan untuk kebijakan tentang sistem informasi sangat memerlukan dukungan Top Management guna kepentingan intern Depnaker maupun ekstern yang dapat menjamin kerja sama dengan daerah dan dunia usaha.

Jangka Pendek 2002-2004

1. SK Menteri

Sistem Informasi yang ada adalah merupakan suatu sarana yang mempunyai ragam kegunaan begitu kompleks dan memerlukan pemahaman yang terus menerus terutama dalam mendukung kegiatan administrasi maupun informasi untuk kebijakan. Untuk itu dibutuhkan Surat Keputusan yang memayungi, mendukung serta menempatkan sistem informasi sebagai sarana untuk meningkatkan misi Departemen dan sekaligus layanan dan kontrol dari masyarakat.

2. Standar Operatibility

Dalam upaya mendayagunakan komputer yang tersebar saat ini diperlukan adanya standar baku yang harus tersedia yang mencakup format data dan pertukarannya, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi dan pengembangannya.

3. Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Guna menjaga kontinuitas dari informasi yang dihasilkan perlu dibuat kesepakatan untuk mengatur hubungan kerja sama dari unit penyedia data dengan unit informasi khususnya dalam hal pengaturan pertukaran data dan informasi melalui media elektronik/jaringan ditingkat pusat serta memperhatikan otorisasi daerah.

4. Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi

Dengan terbukanya informasi melalui jaringan maka keamanan data menjadi hal serius yang harus diperhatikan.

- Pendefinisian kebijakan keamanan, akses dan terminologi kerahasiaan / jaminan data.
- Harus disediakan infra struktur untuk melakukan backup serta dibuat jadual untuk kegiatan tersebut termasuk peremajaan data/recovery terhadap data.
- Untuk keamanan serta kewenangan akses terhadap informasi perlu dibuat lapisan tingkatan password menurut kewenangan pengguna informasi.
- Setiap informasi yang dihasilkan harus menyebutkan unit penyedia atau penanggung jawab yang jelas.

5. Detail Master Plan

Master Plan yang tersedia harus dijabarkan lebih jauh kedalam Detail Plan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadual yang direncanakan.

Jangka Menengah 2005-2007

1. Implementasi Organisasi SOP

Untuk mendukung penerapan SOP kedalam organisasi maka dilakukan gerakan untuk mengimplementasikannya.

Jangka Panjang 2008-2010

2. Cost Center menjadi Profit Center

Melakukan perubahan dimana selama ini bila terjadi suatu kegiatan dibentuk maka secara otomatis mengakibatkan dukungan biaya. Dimasa mendatang kegiatan sistem informasi diupayakan dapat memberikan pemasukan yang dapat digunakan untuk kelangsungan pengelolaan sistem informasi.

5.2. Program Pengembangan Infrastruktur

Jangka Pendek 2002-2004

1. Optimasi Perangkat Keras di Pusat

Perangkat keras yang dimiliki oleh masing-masing unit kiranya dapat dimaksimalkan penggunaannya mengingat bahwa negara kita belum dapat mendukung pengadaan sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan cara mengoptimalkan peralatan yang ada perlu diupayakan secara maksimal penggunaannya sambil menunggu studi kelayakan untuk rencana pengembangan.

2. Optimasi Perangkat Lunak di Pusat

Pemanfaatan aplikasi perangkat lunak dan operating system alternatif, yang memberikan fungsi sama, tetapi tidak menuntut perangkat keras yang besar serta harga perangkat lunak yang ekonomis.

3. Optimasi Internet di Pusat

Dalam mengantisipasi penyajian informasi melalui internet maka infra struktur yang tersedia perlu pengkajian yang dalam serta perencanaan untuk pengembangan sehingga akses kedalam maupun keluar menjadi cepat dan lancar.

Jangka Menengah 2005-2007

1. Penyempurnaan Backbone di Pusat

Jaringan yang ada di Pusat sebaiknya dapat mengantisipasi penambahan pengguna baru, dimana jalur yang tersedia perlu direncanakan untuk fasilitas yang lebih baik untuk di pusat server.

2. Optimasi Perangkat Keras di Daerah

Guna menjamin hubungan secara kelembagaan secara elektronik, maka infrastruktur di Daerah harus dikembangkan. Hal ini sangat perlu diperhatikan sehubungan untuk akses melalui internet peralatan yang ada harus pula mengikuti sesuai dengan standar spesifikasi yang berlaku.

3. Koneksi Internet di Daerah

Seperti poin 2 diatas koneksi ke internet sudah merupakan kebutuhan sehingga untuk menjamin hubungan tersebut perlu dijaga kontinuitas serta pengembangannya.

Jangka Panjang 2008-2010

1. Otomasi Pemasukan Data

Pada tahap ini diperkirakan layanan untuk masyarakat semakin meningkat, sehingga agar dapat memberikan layanan yang prima diperlukan infra struktur yang mengarah pada otomasi pemasukan data sehingga proses pemasukan data dapat dipersingkat waktunya serta dijamin validasinya.

2. Peremajaan dan Pengembangan Perangkat Keras

Untuk menjaga kontinuitas data dan informasi perlu dukungan perangkat keras yang memadai dan untuk itu peralatan yang ada perlu diupayakan untuk dilakukan peremajaan sesuai dengan perkembangan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan, selain itu juga pemeliharaan bagi perangkat keras yang masih valid perlu dilakukan.

3. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan

Infra struktur bagi jaringan merupakan jantung bagi informasi intranet maupun internet, untuk itu pemeliharaan dan

pengembangan baik perangkat keras maupun perangkat lunak perlu mendapat prioritas serta harus direncanakan secara baik dan berkualitas.

5.3. Program Peningkatan Kompetensi SDM Informasi

Jangka Pendek 2002-2004

1. Membudayakan Penggunaan Komputer

Penggunaan komputer sebagai sarana guna menunjang kegiatan sehari-hari perkantoran membutuhkan waktu untuk sosialisasi, untuk itu penggunaan komputer harus bergeser dari pemahaman pribadi/khusus kepada alat yang dapat digunakan bagi semua orang. Pemahaman eksklusif harus digeser pada pengertian sebagai alat yang perlu untuk digunakan untuk semua orang sehingga dalam waktu yang tidak relatif lama budaya penggunaan komputer telah tersosialisasikan. Pembudayaan komputer untuk kegiatan harian perlu adanya motivasi dan dorongan secara terus menerus dan salah satu pemacu kearah itu adalah peran Pimpinan yang harus dapat menjadi leader serta merupakan prioritas utama bagi sosialisasi penggunaan tersebut seperti melalui dokumen, buku, penerbitan.

2. Pelatihan Pengelola Internet & Intranet

Untuk dapat menjaga informasi yang tersaji melalui media elektronik, maka pengetahuan yang berhubungan dengan Markup Language (seperti HTML, DHTML, XML), Desain Graphic untuk WEB perlu diberikan bagi para pengelola internet dan intranet.

Jangka Menengah 2005-2007

1. Pelatihan Pengembangan Aplikasi

Pelatihan ini bertujuan bagi para pengelola aplikasi agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan/peremajaan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik.

2. Jabatan & Reward

Bagi para pengelola komputer maupun aplikasi perlu dipersiapkan untuk jabatan-jabatan fungsional yang mendukung kegiatan sehari-hari serta memberikan dukungan finansial yang memadai.

Jangka Panjang 2008-2010

1. Retraining

Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang perangkat keras maupun perangkat lunak serta teknologi jaringan dan internet, maka secara periodik perlu direncanakan pelatihan/bimbingan untuk refreshing khusus bidang Teknologi Informasi.

2. Pendidikan Formal Bidang TI

Dalam rangka mendukung sistem informasi serta untuk mengantisipasi kemajuan teknologi informasi, maka secara

terencana perlu disiapkan tenaga pengelola melalui pendidikan formal.

5.4. Program Pengembangan Aplikasi

Jangka Pendek 2002-2004

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan per undang-undangan merupakan prioritas yang harus segera dibangun, dimana masyarakat melalui fasilitas internet yang telah dibangun mengisyaratkan adanya kebutuhan tersebut bagi masyarakat. Dengan terbangunnya aplikasi ini diharapkan segala permasalahan yang berhubungan dengan peraturan ataupun hukum ketenagakerjaan dapat diakses secara terbuka dan transparan.

2. Penyempurnaan TKI Seluruh Indonesia

Aplikasi TKI yang telah dibangun perlu dikembangkan dalam rangka memberikan kemudahan para pencari kerja ke luar negeri dan mempermudah pengelolaan bagi kebijakan pemerintah, hal ini dapat mengantisipasi kegiatan untuk seluruh indonesia.

3. Penyempurnaan TKA di Pusat

Dalam mengelola aplikasi TKA di Pusat perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah juga sehubungan dengan OTODA.

4. Informasi Bursa TK di Daerah Percontohan

Permasalahan Lowongan dan Pencari kerja sangat erat kaitannya dengan dukungan pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat pelatihan baik pemerintah maupun swasta. Sehubungan jaringan dengan daerah sehubungan OTODA maka perlu dibangun suatu aplikasi yang dapat mengantisipasi kendala yang ada dengan memperhatikan fasilitas dan prasarana teknologi informasi. Dengan telah tersedianya WARNET hampir disetiap Propinsi dan Kabupaten maka pembangunan aplikasi Bursa Tenaga Kerja dan Pelatihan perlu dibangun dengan menggunakan beberapa daerah percontohan.

5. Aplikasi Database Statistik di Pusat

Data statistik yang telah ada dan digunakan sebagai bahan dasar untuk informasi WEB perlu ditingkakan ke arah pembangunan database sehingga informasi yang dihasilkan akan bervariasi dan interaktif.

6. Aplikasi Pelatihan & Sertifikasi

Untuk dapat memberikan informasi tentang Standarisasi Pelatihan serta kekuatan hasil pelatihan menurut standar yang dihasilkan perlu dibangun aplikasi untuk itu. Selain itu fasilitas yang tersedia dalam mendukung standarisasi oleh pemerintah perlu disebarluaskan kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga untuk dapat mengasilkan tenaga kerja yang bermutu sesuai standar dapat dipenuhi dan dicapai.

Jangka Menengah 2005-2007

1. Pengawasan Ketenagakerjaan

Aplikasi yang dapat menunjang tentang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perlu dibangun untuk dapat melakukan deteksi dini tentang peningkatan pelayanan kepada para pekerja terutama jaminan pekerjaan dan keselamatan kerja.

2. Aplikasi Hasil Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang telah dan akan dilaksanakan perlu diinformasikan kepada masyarakat maupun organisasi atau perguruan tinggi dan unit-unit kerja yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

3. Aplikasi GIS

Dengan semakin tersedianya aplikasi-aplikasi ketenagakerjaan GIS (Graphic Information System) adalah merupakan suatu aplikasi yang menarik untuk membuat informasi secara tematik terutama dengan menampilkan informasi berupa peta atau gambar. Penekanan dilakukan kepada data.

4. Duplikasi Aplikasi TKA Seluruh Indonesia

Aplikasi TKA yang telah dibangun kiranya dapat direalisasikan penggunaannya untuk seluruh Indonesia.

5. Informasi Bursa TK Seluruh Indonesia

Aplikasi informasi Bursa Tenaga Kerja yang telah dibangun perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan bagi propinsi yang bersedia untuk mengembangkan aplikasi ini maka perlu dilakukan replikasi sistem sesuai dengan propinsi atau daerah yang membutuhkan dengan segala peraturan yang ditetapkan.

Jangka Panjang 2008-2010

1. Pengembangan Semua Aplikasi

Seluruh aplikasi yang telah dibangun memerlukan pemeliharaan serta pemutahiran sesuai dengan kebutuhan akan informasi yang dihasilkan, untuk itu secara berkesinambungan perlu dilakukan pembaharuan.

5.5. Program Pengelolaan Sistem Informasi

Jangka Pendek 2002-2004

1. Muatan WEB Bidang Hukum

Secara bertahap informasi bidang hukum atau per undang-undangan ketenagakerjaan secara interaktif dapat tersaji kedalam WEB.

2. Muatan WEB Ketenagakerjaan

Secara mutakhir dan berkesinambungan informasi ketenagakerjaan harus dapat tersaji kedalam WEB baik informasi intern maupun ekstern.

3. Penambahan Pemakai Jaringan

Untuk mempercepat sosialisasi penggunaan informasi melalui komputer maka harus diberikan fasilitas untuk menambah pengguna komputer ke dalam jaringan, dengan demikian seluruh fasilitas jaringan dalam intranet dan internet dapat dinikmati dan semakin diminati.

4. Sewa Internet Koneksi

Dengan semakin banyak pengguna jaringan maka fasilitas kecepatan dan ketepatan merupakan kebutuhan yang harus selalu ditingkatkan, untuk itu perlu disiapkan biaya sewa atau memperbesar koneksi internet.

5. Pemeliharaan Perangkat Keras dan Lunak di Pusat

Dalam mengelola sistem informasi peranan biaya perlu direncanakan biaya untuk pemeliharaan perangkat keras dan lunak termasuk para pengelola sistem.

Jangka Menengah 2005-2007

1. Evaluasi Kepuasan Stakeholder

Untuk dapat meningkatkan serta mendeteksi kebutuhan masyarakat maka perlu disusun bahan untuk mengevaluasi kepuasan stakeholder, adapun hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan serta mutu dari layanan informasi.

2. Evaluasi Master Plan

Perkembangan teknologi informasi yang didalamnya mengandung teknologi perangkat keras, perangkat lunak, internet serta jaringan komunikasi serta kesepakatan atau kebijakan dari Pemerintah yang terus berkembang akan mempengaruhi Master Plan; untuk itu evaluasi terhadap Master Plan yang ada perlu di kaji ulang.

3. Pemeliharaan Data Berkelanjutan

Informasi yang uptodate adalah merupakan basis dalam pengelolaan data, untuk itu strategi yang tepat dan berkesinambungan perlu digariskan untuk mendukung pemeliharaan dan pengadaan data baik bersumber dari intern maupun ekstern.

Jangka Panjang 2008-2010

1. Evaluasi Master Plan

Evaluasi Master Plan secara periodik perlu dilakukan terutama dalam kurun waktu yang panjang. Mengacu kepada

kondisi saat ini, paling tidak setiap tiga tahun dilakukan evaluasi terhadap Master Plan.

2. Pemeliharaan Data Berkelanjutan

Pemeliharaan ini sangat perlu mendapat dukungan untuk direalisasikan agar sumber data tetap terjaga dan bermutu.

LAMPIRAN

RANGKUMAN PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN

PROGRAM	PERIODE	KEGIATAN
1. Program Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi	1. Jangka Pendek	<ol style="list-style-type: none">1. SK Menteri2. Standar Operability3. Standar Operasi dan Prosedur (SOP)4. Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi5. Detail Master Plan
	2. Jangka Menengah	Implementasi Organisasi SOP
	3. Jangka Panjang	<i>Cost Center</i> menjadi <i>Profit Center</i>
2. Program Pengembangan Infrastruktur	1. Jangka Pendek	<ol style="list-style-type: none">1. Optimasi Perangkat Keras di Pusat2. Optimasi Perangkat Lunak di Pusat3. Optimasi Internet di Pusat
	2. Jangka Menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyempurnaan Backbone di Pusat2. Optimalisasi Perangkat Keras di Daerah3. Koneksi Internet di Daerah

	3. Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otomasi Pemasukan Data 2. Peremajaan dan Pengembangan Perangkat Keras 3. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan
3. Program Peningkatan Kompetensi SDM Informasi	1. Jangka Pendek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membudayakan Penggunaan Komputer 2. Pelatihan Pengelola Internet dan Intranet
	2. Jangka Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pengembangan Aplikasi 2. Jabatan dan Reward
	3. Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retraining 2. Pendidikan Formal Bidang TI
4. Program Pengembangan Aplikasi	1. Jangka Pendek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan 2. Penyempurnaan TKI Seluruh Indonesia 3. Penyempurnaan TKA di Pusat 4. Informasi Bursa TK di Daerah Percontohan 5. Aplikasi Database Statistik di Pusat 6. Aplikasi Pelatihan dan Sertifikasi

	2. Jangka Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Ketenagakerjaan 2. Aplikasi Hasil Penelitian 3. Aplikasi GIS 4. Duplikasi Aplikasi TKA Seluruh Indonesia 5. Informasi Bursa TK Seluruh Indonesia
	3. Jangka Panjang	Pengembangan Semua Aplikasi

5. Program Pengelolaan Sistem Informasi	1. Jangka Pendek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan WEB Bidang Hukum 2. Muatan WEB Ketenagakerjaan 3. Penambahan Pemakai Jaringan 4. Sewa Internet Koneksi 5. Pemeliharaan Perangkat Keras dan Lunak di Pusat
	2. Jangka Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kepuasan Stakeholder 2. Evaluasi Master Plan 3. Pemeliharaan Data Berkelanjutan
	3. Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Master Plan 2. Pemeliharaan Data Berkelanjutan

DAFTAR ISTILAH

Data berkualitas

Suatu sistem data yang memenuhi berbagai kriteria, secara umum meliputi : *efficiency, functionality, maintainability, portability, realibility, usability* berdasarkan ISO standard. Hal ini mencakup keakuratan, kehandalan, keterkinian, keamanan, kelengkapan, relefansi dan faktor lainnya, yang dapat diturunkan dari ISO sampai 30 faktor.

Data terdistribusi

Suatu mekanisme data yang terletak secara terdistribusi dapat dilihat dari sisi geografis ataupun perangkat kerasnya.

Dial up

Metode pengaksesan jaringan komputer yang menggunakan saluran telepon biasa atau public switch telephone network (PSTN), yang biasanya masih dalam format analog.

Extranet

Suatu cara penggunaan data/informasi secara bersama oleh beberapa organisasi yang memanfaatkan teknologi internet. Dalam extranet organisasi yang mengakses hanya terbatas.

Homepage

Adalah tempat secara maya untuk menampilkan informasi, saat ini menggunakan teknologi internet yang berbasis markup language.

Internet

Suatu jaringan dunia yang menggunakan berbagai bentuk sarana komunikasi yang berdasarkan protokol TCP/IP. Keberadaan jaringan ini relatif bebas dalam pengembangannya.

Intranet

Penerapan teknologi internet untuk keperluan sebuah organisasi. Teknologi ini adalah peningkatan kemampuan dari local area network (LAN).

Jaringan Komputer

Sebuah fasilitas pertukaran data yang menerapkan teknologi komunikasi dan komputer. Ada berbagai format data dan jaringan yang digunakan pada perkembangan terakhir, bahkan telah digabungkan antara video, suara, telepon dan sebagainya.

Leased Line

Suatu infrastruktur komunikasi dengan kabel yang *dedicated* atau tersambung secara terus menerus antara satu point ke point lainnya.

Local Area Network (LAN)

Bentuk jaringan komputer yang cakupan geografisnya terbatas kurang dari

5 km.

Markup Language

Suatu standard penulisan dokumen untuk pertukaran data, terutama sejak semakin populernya internet. Berbagai bentuk Markup language seperti HTML, DHTML, XML.

Metropole Area Network (MAN)

Bentuk jaringan komputer yang cakupan geografisnya terbatas kurang dari 50 km.

Sistem Informasi (SI)

Adalah suatu sistem untuk informasi, cakupan dari SI adalah luas meliputi teknologi informasi, organisasi, budaya, sumber daya manusia, bahasa, dan sebagainya.

Sistem Informasi Management (SIM)

Adalah penterjemahan dari Management Information System (MIS), suatu bentuk usaha untuk mengelola data agar dapat dijadikan informasi yang lebih bermanfaat. Tingkatan yang lebih tinggi dari SIM adalah Decision Support System, Executive Information System.

Situs

Adalah terjemahan dari site, yang berarti tempat atau alamat pada internet, services yang dapat diberikan adalah beragam, seperti web, ftp, chat, dan sebagainya.

Teknologi Informasi (TI)

Merupakan bagian dari Sistem Informasi, di dalam teknologi informasi mengandung komponen perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dokumen, standard, dan sebagainya.

Website

Adalah tempat atau alamat pada internet yang memberikan services berdasarkan teknologi markup language, yang populer adalah dengan menggunakan HTML.

Wide Area Network (WAN)

Bentuk jaringan komputer yang cakupan geografisnya terbatas lebih dari 5 km.

DAFTAR SINGKATAN

AKAD	:	Antar Kerja Antar Daerah
AKAL	:	Antar Kerja Antar Lokal
AKAN	:	Antar Kerja Antar Negara
	:	Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
BIKK	:	Direktorat Jenderal
Ditjen	:	Kantor Wilayah
Kanwil	:	Kerangka Teknologi Informasi Nasional
KTIN	:	Management Information System
MIS	:	Otonomi Daerah
Otoda	:	
P4D	:	Penyusun Program, Evaluasi, dan Laporan
PPEL	:	Sistem Informasi
SI	:	Sistem Informasi Ketenagakerjaan
SIK	:	Sistem Informasi Manajemen
SIM	:	Sistem Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja
SIPPTTEK	:	Standard Operating Procedure
SOP	:	Teknologi Informasi
TI	:	Tenaga Kerja
TK	:	Tenaga Kerja Asing
TKA	:	Tenaga Kerja Indonesia
TKI	:	

DAFTAR PUSTAKA

1. Inpres No.6/2001 – Telematika Indonesia,
www.detikinet.com/database/inpres62001/index.html
2. Blue Print Telekomunikasi, www.detik.com/gudangdata/bp-telkom/index.shtml
3. Keppres No. 50/2000 – Tim Telematika,
www.detik.com/gudangdata/keppres50-2000/index.shtml
4. UU No.36/1999 – Telekomunikasi, www.detik.com/gudangdata/w36-99/index.shtml
5. NUSANTARA 21 – Kerangka Konseptual,
www.detik.com/net/onno/journal/200004/aplikasi/n21/n21-0.shtml
6. Tim Telematika, Konsep Telematika, Bappenas, 1994
7. Tim KTIN, Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN), Bappenas, 2000
8. Information Technology Policies and Guidelines,
web.worldpac.net/it/policies.htm
9. Douglas Holmes, eGov : e-Business Strategies for Government, Nicholas Brealey, 2001
10. Kevin Bacon, Collen Wesling, etc, E- Government : The Blueprint, John Wiley & Sons, 2001
11. Beatrice Sarraf, eGovernment Initiatives in France : Services for Creating a True eEurope, 2001
12. Infocomm 21 Masterplan – Singapore Government, www.ida.gov.sg